

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 81 TAHUN 2022**

**TENTANG  
TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Hukum Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
5. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Analisis dan Evaluasi Hukum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab dan Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Hukum yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertanggung jawab terhadap analisis dan evaluasi hukum.
2. Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertugas melakukan kegiatan:
  - a. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
  - b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - c. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum; dan
  - g. advokasi hukum.

KETIGA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2022  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 81 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

**TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/ Jabatan</b>
1.	Penanggung Jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
2.	Anggota	1. Rinaldi Morintosh 2. Rasmita Juliana Sitepu 3. Ardian Hoppin Sitompul 4. Benny Leopold Dumais 5. Asih Riska Nurmasari 6. Cherish Shery Desarya 7. Mahatmya Widyasri 8. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO